

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BAWASLU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 28/KU.01.00/JK/07/2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu aturan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pejabat Perbendaharaan dan Petugas Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,

Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686311/2024 Tanggal 24 November 2023;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

- KESATU : Mengesahkan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum di kolom pada lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Perbendaharaan dan Petugas Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Penanggungjawab Pengelola Keuangan tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan TA 2024 Satuan Kerja Sekretariat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SP DIPA- 115.01.2.686311/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 1 Juli 2025 dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Juli 2025

**KEPALA SEKRETARIAT,**



**Ir. LITA GUSTINA, M.Si**  
**NIP. 196801201994032001**

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat  
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 28/KU.01.00/JK/07/2025  
Tanggal : 1 Juli 2025

**NAMA – NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO  | SEMULA                    | JABATAN                                                            |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Priambodo                 | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| 2.  | Aufia Widodo              | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 3.  | Haris Dharma Persada      | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur   |
| 4.  | Yunanto Dwi Prabowo       | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat   |
| 5.  | Eka Kawuryan Danuarti     | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara   |
| 6.  | Putri Usmawati            | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu        |
| 7.  | Rahardianti Kusumo Astuti | BPP Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat                        |
| 8.  | Wangsit Ratri             | BPP Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan                      |
| 9.  | Tika Arisandi             | BPP Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                        |
| 10. | Jimmi Mustafa             | BPP Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat                        |
| 11. | Ajeng Kusharumdini        | BPP Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara                        |
| 12. | I Gede Prasaramanela      | BPP Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu                             |

**KEPALA SEKRETARIAT,**



**Ir. LITA GUSTINA, M.Si**  
**NIP. 196801201994032001**